



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DARI PERSPEKTIF  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
PERIMBANGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ELVIKA PUSPA DANITA BR. KARO**  
**NPM 1415100178**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELVIKA PUSPA DANITA BR.KARO  
NPM : 1415100178  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : ANALISI KINERJAKEUANGAN DARI PERSPEKTIF  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
PERIMBANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
LANGKAT

Medan, 13 Juli 2019

Ketua Program Studi

Dekan

(ANGGI PRATAMA NASUTION, S.E., M.Si) (DR. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

Pembimbing I

Pembimbing II

(BR.PURBA, S.E., M.Si., Ak., CA) (OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANTIA UJIAN SARJANA LENGK./P FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ELVIKA PUSPA DANITA BR.KARO  
NPM : 1415100178  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : SI ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DARI  
PERSPEKTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DAN DANA PERIMBANGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN LANGKAT

Medan, 13 Juli 2019

Ketua Program Studi



ANGGI PRATAMA NASUTION, S.E., M.Si (RAHIMA BR.PUREA, S.E., M.Si, Ak., CA)

Anggota II

OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si)

Anggota I

Anggota III

(JUNAWAN, S.E., M.Si)

Anggota IV

(YUNITA SARI RIONI, S.E., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvika Puspa Danita Br.Karo  
NPM : 1415100178  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang : Strata-I  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DARI  
PERSPEKTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DAN DANA PERIMBANGAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini menatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan hasil dari karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penung tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan ynag berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Elvika Puspa Danita Br.Karo

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvika Puspa Danita Br.Karo  
Tempat/ Tanggal Lahir : Hidup Baru / 20 agustus 1996  
NPM : 1415100178  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jl.Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.  
Langkat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjan lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2018

Yang Membuat Pernyataan



Elvika Puspa Danita Br.Karo

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Mengetahui tanda tangan di bawah ini :

Nama : ELVIKA PUSPA DANITA BR KARO  
 Tanggal Lahir : HIDUP BARU / 20 Agustus 1996  
 No. Mahasiswa : 1415100178  
 Jurusan : Akuntansi  
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik  
 SKS : 127 SKS, IPK 3.16

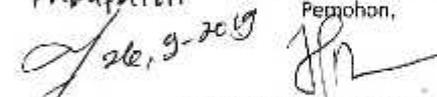
yang telah dicapai

mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis investasi, jumlah angkatan kerja dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kota medan	<input type="checkbox"/>
Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota medan	<input type="checkbox"/>
Pengaruh pendapatan asli daerah ( PAD ) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kab langkat	<input checked="" type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda  Analisis kinerja keuangan dari perspektif pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Langkat  
Medan, 04 Desember 2017

  
 ( R. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D. )

Pemohon,  
  
 ( ELVIKA PUSPA DANITA BR KARO )

Nomor : .....  
Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

( Drs. Anwar Saadati, M.Si. )

Tanggal : 18 Desember 2017

Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Akuntansi

( Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Rahmsya S. Pambayun, SE., M.Si )

Tanggal : 19-1-2018

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II :

( Oktaviana E. Komalah, S.P., M.Si )

Formulir: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

**UNDA BEBAS PUS**

No. 1365/PCRP/BP/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Melalui : Permohonan Meja Hijau



Medan, 19 November 2018  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELVIKA PUSPA DANITA BR KARO  
Tempat/Tgl. Lahir : HIDUP BARU / 20 Agustus 1996  
Nama Orang Tua : YUSUP KARIM KARO KARO  
N.I.S. : 1415100178  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 082240555527  
Alamat : Jln wonosari kelurahan perdamaian kecamatan stahat kabupaten langkat

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Analisis Kinerja Keuangan dari perspektif pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pemerintah kabupaten langkat, selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan RKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas Jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,250,000</b>
<b>5. Uk. 50%</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.500.000</b>
		<b>4.750.000</b>

19/03/2019  
*[Signature]*  
Fus

Hormat saya  
*[Signature]*  
ELVIKA PUSPA DANITA BR KARO  
1415100178



- Sangat permohonan ini sah dan berlaku bila :
- Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
  - Daftar Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**Telah di terima**  
**berkas persyaratan**  
**dapat di proses**  
**Medan, 19 MAR 2019**

Ka. BPAA  
*[Signature]*  
**TEGUH WAINONO, SE., MM.**



# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 14-11-18 3:13:38 PM

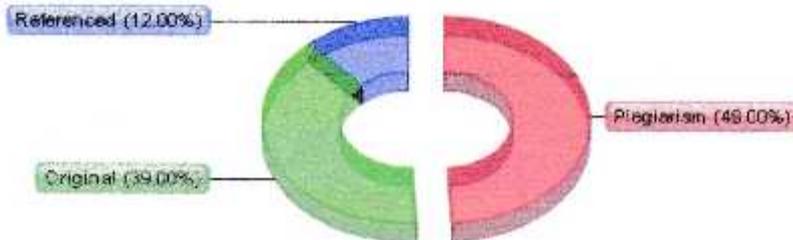
## "ELVIKA PUSPA.D. BR.KARO\_1415100178\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License2



*Handwritten note: 19/3-18*

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

words: 7653	<a href="http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnal/mia/Images/Jurnal/vol.1.ma/1.1.ma/2.15.29.ebit.pdf">http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnal/mia/Images/Jurnal/vol.1.ma/1.1.ma/2.15.29.ebit.pdf</a>
words: 4753	<a href="http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymce/pukigambar/file/Espinoza.pdf">http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymce/pukigambar/file/Espinoza.pdf</a>
words: 4429	<a href="https://docplayer.info/224036-Analisis-pengaruh-penerimaan-retribusi-daerah-terhadap-pendap...">https://docplayer.info/224036-Analisis-pengaruh-penerimaan-retribusi-daerah-terhadap-pendap...</a>

Further Sources:]

Processed resources details:

275 - Ok / 35 - Failed

Further Sources:]

Important notes:

Wikipedia: Google Books: Ghostwriting services: Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : RAHIMA PURBA, SE, MS, AK, CA  
 Pembimbing II : OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE, MSi  
 Mahasiswa : ELVIKA PUSPA DANITA BR KARO  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1415100178  
 Bidang Pendidikan : SI (Satu Satu)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan dari Perspektif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Pemerintah Kab Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2018	Pembahasan ditambah dgn PAD → dominan darimana Dana Perimbangan → ? Kinerja → ? Teknik Penulis Daftar Pustaka - Buku / jurnal / skripsi / tesis - UU / PP / SK / Perpres - Website (tgl, jam akses)		
2018	Tambahkan peta daerah bab IV. Pembahasan disesuaikan dgn Rumusan Daftar Pustaka,		Aca sides 08/11-2018 

Medan, 29 Oktober 2018  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Kahliana Purba, SE, Msi, Ak, SA  
 Dosen Pembimbing II : Okbarini Khamilah Siregar, SE, Msi  
 Nama Mahasiswa : ELVIKA PUSPA DANITA BR KARO  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100178  
 Bidang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan dari perspektif pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pemerintah kab langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
18	Perbaiki sistematika penulisan laporan skripsi untuk penomoran, penguatan sumber ditabel dan Gambar, kata pengantar, dan Referensi daftar pustaka		
18	Perbaiki sistematika penulisan Skripsi untuk penomoran & Bab 4, sumber & definisi operasional Situat  Acc & Sidang Meja Hijau		

Medan, 29 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan nilai pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2017, untuk mengetahui penerimaan nilai dana perimbangan kabupaten Langkat tahun 2013-2017 dan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dari perspektif Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan Kabupaten Langkat tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif dalam mendeskripsikan hasil analisis dengan metode Rasio Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang baik karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Sedangkan upaya dan kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan Dana Perimbangan dinilai cukup baik karena pemerintah mampu memaksimalkan sumber dana yang diterima dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Rasio Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the development of regional income receipts in Langkat Regency during 2013-2017, to determine the acceptance of the value of the balance of the Langkat district in 2013-2017 and to determine the financial performance of the Langkat District Government from the perspective of Regional Original Income (PAD), and Langkat Regency balancing fund in 2013-2017. This research is a Quantitative Descriptive study in describing the results of analysis using the Local Government Financial Ratio method consisting of Independence Ratios, Effectiveness of Regional Original Revenue (PAD), Efficiency Ratio, Activity Ratio, and Regional Original Revenue Growth Ratio (PAD). The results of this study indicate that the Langkat District Government in maintaining and increasing Regional Original Revenue (PAD) is still not good because the low realized Local Revenue (PAD) cannot meet the planned targets. Whereas the government's efforts and capabilities in maximizing the Balancing Fund were considered quite good because the government was able to maximize the sources of funds received in improving the Financial Performance of the Langkat District Government.*

**Keywords:** *Financial Performance, Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Local Government Financial Ratios, Langkat District Government.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	10
2. Dana Perimbangan .....	15
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	17
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
5. Rasio Keuangan Daerah.....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data .....	28
D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Hasil Penelitian .....	36
	1. Sejarah Umum Kabupaten Langkat .....	36
	2. Visi Misi Kabupaten Langkat .....	40
	3. Struktur Organisasi.....	42
	4. Bidang Kerja .....	43
	5. Analisis Data .....	45
	a. Rasio Kemandirian.....	47
	b. Rasio Efektivitas .....	49
	c. Rasio Efisiensi.....	52
	d. Rasio Aktivitas/Keserasian .....	54
	e. Rasio Pertumbuhan PAD .....	55
	B. Pembahasan.....	57
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**  
**BIODATA PENULIS**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab.Langkat .....4
Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah .....21
Tabel 2.2	Kriteria Pengukuran Efektivitas.....22
Tabel 2.3	Kriteria Pengukuran Efisiensi .....22
Tabel 2.4	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....23
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian .....27
Tabel 3.2	Operasional Variabel .....29
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.Langkat (dalam jutaan rupiah) .....46
Tabel 4.2	Dana Perimbangan Kab.Langkat (dalam jutaan rupiah).....47
Table 4.3	Target dan Realisasi PAD (dalam rupiah) .....47
Table 4.4	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab.Langkat .....48
Table 4.5	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kab.Langkat.....51
Table 4.6	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kab.Langkat .....53
Table 4.7	Rasio Aktivitas/Keserasian Daerah Kab.Langkat .....54
Table 4.8	Rasio Pertumbuhan PAD Kab.Llangkat .....56

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan dari Perspektif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Pada Kabupaten Langkat”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai macam kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Rahima br.Purba S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan dan perbaikan skripsi.
5. Ibu Oktarini Khamilah Siregar S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, serta arahan dalam penulisan dan perbaikan skripsi.
6. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Penguji I yang telah memberikan masukan serta saran dalam hasil skripsi ini.

7. Ibu Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan masukan serta saran dalam hasil skripsi ini.
8. Teristimewa diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Yusup Karim Karo-Karo dan Ibunda tercinta Farida Ningsih yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materil, kasih sayang serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada adik-adikku atas semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Rekan-rekan ku Akuntansi Siang Angkatan 2014 yang selalu membantu, menemani, memberikan semangat dan motivasi untuk menjadi yang lebih baik.
11. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas pelajaran hidup yang sangat berharga sehingga telah mengisi hari-hari menjadi bermakna dan penuh warna.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti materi yang sama.

Medan, Juli 2019

Elvika Puspa Danita br.Karo

1415100178

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah, yaitu diberi kewenangan , mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU tersebut mengatakan bahwa setiap daerah diberikan kebebasan dalam menentukan alokasi sumber daya kedalam alokasi belanja-belanja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, menata, dan mengurus segalanya yang berkaitan dengan daerahnya dengan bantuan dari pemerintah, disamping itu pemerintah daerah juga diberi keleluasaan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.

Tujuan otonomi daerah atau desentralisasi yaitu penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencapai efisien, efektif, dan lebih bertanggungjawab. Selain itu, tujuan pelaksanaan desentralisasi mendorong pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh setiap daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disebabkan semakin terbukanya peluang bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya dan sumber pendanaan yang dimiliki daerah. Diberlakukannya otonomi daerah tersebut memberikan

kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah maka pemerintah perlu meningkatkan anggaran.

Dalam pengertian yang sederhana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Yang dimaksud sumber pendapatan asli daerah seperti, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No.32 tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*, salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintahan daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Undang-Undang No.33 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dan pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara sederhana kinerja keuangan pemerintah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006:117). Menurut Halim (2008 : 2004) “menjelaskan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi penganggaran oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang terluas wilayahnya dari 33 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kondisinya yang sangat variatif, dengan perbedaan antara Kabupaten/Kota yang lain, secara otomatis mungkin relatif, namun secara daerah cukup luas. Perbedaan tersebut tentunya membuat akan berpengaruh terhadap sumber-sumber pendapatan dan juga belanja yang dikeluarkan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara ekonomis, efektifitas, dan efisien pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan. Desentralisasi pemerintah daerah, kabupaten/kota

menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan terhadap daerahnya masing-masing dalam mengoptimalkan kinerja yang baik.

**Tabel 1.1 Data PAD dan Dana Perimbangan  
Kab.Langkat Tahun 2011-2015**

No	Tahun	PAD	Dana Perimbangan
1	2013	Rp 65.521.499.189	Rp 1.419.706.153.815
2	2014	Rp 107.811.975.574	Rp 1.540.371.084.996
3	2015	Rp 122.715.359.909	Rp 1.804.265.890.370
4	2016	Rp 132.673.213.412	Rp 1.881.248.377.772
5	2017	Rp 139.717.647.855	Rp 1.871.062.152.590

Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Langkat,2018.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat cenderung mengalami kenaikan. Tertinggi terjadi ditahun 2017 sebesar Rp 139.717.647.855 dan terendah terjadi di tahun 2013 sebesar Rp 65.521.499.189 meskipun mengalami peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat Kab.Langkat masih dinilai rendah. Sedangkan dari dana perimbangannya dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun mulai 2013-2016 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meski pun ditahun 2017 mengalami penurunan diangka Rp 1.871.062.152.590 Tentu saja hal ini otomatis akan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah yang ada di Kabupaten Langkat.

Fenomena atau masalah tentang pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat terjadi dari 23 Kecamatan yang ada, hanya sebanyak 18 Kecamatan saja yang memenuhi target pendapatan asli daerahnya. 5 diantara yang tidak memenuhi target pendapatan asli daerah adalah Sei Bingei, Stabat, Tanjungpura, Secanggang, dan Gebang. Untuk itu, kedepannya diharapkan seluruh dinas, instansi, kecamatan yang ada dapat terus ditingkatkan pendapatan mereka

sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Langkat akan terus meningkat diberbagai bidang dan sektor. (Sumber : [www.antarasumut.com](http://www.antarasumut.com))

Di sisi lain peran pemerintah pusat untuk kabupaten langkat masih dinilai cukup tinggi, dimana pemerintah kabupaten langkat belum dapat memenuhi target pendapatan asli daerahnya secara keseluruhan. Dengan kata lain, dana yang di dapat dari pemerintah pusat sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di daerah kabupaten langkat. Instansi tersebut menjadi perhitungan dan tanda tanya dari kalangan pejabat di Kabupaten Langkat, termasuk dari kalangan DPRD Langkat sendiri, sebab instansi merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlalu rendah.

Pengukuran/penilaian suatu kinerja merupakan salah satu alat manajemen untuk meningkatkan mutu dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Salah satu akuntabilitas yaitu salah satu elemen pokok dalam mewujudkan *good governance*. Pemerintah diminta supaya seluruh laporan hasil dari program yang sudah dilakukan supaya masyarakat dapat menilai dan melihat dengan jelas. Kinerja keuangan daerah adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Pada Kabupaten Langkat jika dilihat dari data, Dana Perimbangan yang terjadi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang secara otomatis berpengaruh kurang baik terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, karena semakin tinggi Dana Perimbangan yang terjadi di Kabupaten Langkat, maka semakin tinggi kebutuhan bantuan yang akan diminta Kabupaten Langkat ke Pemerintah pusat.

Analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode

dengan periode sebelumnya. Sehingga, dapat diketahui bahwa kecenderungan yang terjadi. Dalam organisasi pemerintah untuk menilai kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas atau keserasian dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan mengetahui data dan masalah yang terjadi dalam keuangan Kabupaten Langkat, melalui data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana perimbangan, saya akan melakukan Analisis dengan mencari hasil antar dua hal tersebut dengan Kinerja Keuangan Pemerintah yang ada di Kabupaten Langkat.

Dengan demikian, dilihat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Kabupaten Langkat**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat terjadi dari 23 Kecamatan yang ada, hanya sebanyak 18 Kecamatan saja yang memenuhi target pendapatan asli daerah. 5 diantara yang tidak memenuhi target adalah Sei Bingei, Stabat, Tanjungpura, Secanggang, dan Gebang.
- b. Peran Pemerintah pusat untuk Kabupaten Langkat masih sangat dominan, dimana Pemerintah Kabupaten Langkat masih belum dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini , maka peneliti melakukan pembatasan sebagai berikut:

- a. Hanya melakukan pembahasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat di Tahun 2013 sampai 2017.
- b. Hanya melakukan pembahasan tentang Dana Perimbangan Kabupaten Langkat di Tahun 2013 sampai 2017.
- c. Melakukan Analisis Kinerja Keuangan dari perspektif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan melalui Rasio Keuangan Daerah .

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Langkat selama Tahun 2013 sampai dengan 2017?
2. Bagaimana Pengelolaan dana perimbangan di Kabupaten Langkat selama Tahun 2013 sampai dengan 2017?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah selama Tahun 2013-2017 ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan nilai pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2017.
- b. Untuk mengetahui penerimaan nilai dana perimbangan Kabupaten Langkat terhadap kinerja keuangan kabupaten Langkat.
- c. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Langkat yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek teoritis (keilmuan).
  - 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.
  - 2) Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.
- b. Aspek Praktis (guna laksana)
  - 1) Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting atau bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
  - 2) Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ebit Julitawati, dkk yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Aceh periode 2009-2011”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dari Perspektif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Langkat”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.
2. Lokasi penelitian : Lokasi penelitian terdahulu pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
3. Objek Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu pada Provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah semua pihak yang diakui sebagai penambah nilai aset atau kekayaan yang berisi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan murni daerah yang dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Adiasasmita (2014 : 2) menyatakan, “pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal”. Halim (2012 : 101) menyatakan, “pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

## 1). Pajak Daerah

Dalam pengertian yang sederhana, Mardiasmo (2013:12), menyatakan pajak daerah adalah kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

a) Kriteria pajak daerah yang ditetapkan Undang-Undang bagi kab/kota adalah sebagai berikut:

- (1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- (2) Objek pajak terletak diwilayah daerah daerah kab/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah kab/kota yang bersangkutan.
- (3) Dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- (4) Potensi memadai
- (5) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif
- (6) Memberikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

b) Jenis pajak daerah kab adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- (2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

- (3) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi jenis petunjukan permainan setiap orang yang dipungut bayaran.
  - (4) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang.
  - (5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
  - (6) Pajak pengambilan galian golongan C
  - (7) Pajak parkir.
- c) Subjek pajak dan wajib pajak daerah adalah sebagai berikut:
- (1) Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memilikinya.
  - (2) Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan.
  - (3) Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakannya.
  - (4) Subjek pajak pengambilan dan pemanfaat air bawah tanah, wajib pajaknya orang atau badan yang mengambilny.
  - (5) Subjek pajak hotel, wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
  - (6) Subjek pajak restoran, wajib pajaknya pengusaha restoran.
  - (7) Subjek pajak hiburan, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan.

- (8) Subjek pajak reklame, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan.
- (9) Subjek pajak penerangan jalan, wajib pajaknya orang pribadi atau badan pelanggan listrik atau penggunaan listrik.
- (10) Subjek pajak pengambilan galian golongan C, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- (11) Subjek parkir, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

d) Objek pajak daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (2) Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (3) Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan motor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (4) Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah terdiri dari, pengambilan air bawah tanah/ air permukaan, pemanfaatan air bawah tanah/ air permukaan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/ atau air permukaan.

- (5) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (6) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (7) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (8) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (9) Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- (10) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (11) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mamesa dalam Arbie (2013) menyatakan bahwa, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk fungsi peningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan sesuai kebutuhan guna untuk memperkecil ketergantungan dan mendapatkan dana dari pemerintah. Hal ini

berarti usaha peningkatan PAD harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dan tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitan Kesatuan Persatuan Indonesia. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan berbagai keperluan yang ditentukan oleh daerah sendiri, khususnya keperluan rutin di daerah.

## **2. Dana Perimbangan**

### **a. Pengertian Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah antar antara daerah agar tidak ada satupun yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat. Dana perimbangan terbagi atas :

- 1) Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal, dan di distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan dengan formula berdasarkan bahwa daerah terbelakang harus menerima lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang mendapatkan penerimaan yang tinggi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, dan jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten ditetapkan imbangan 10% dan 90%.

- 2) Dana Alokasi Khusus, merupakan dana transfer yang bersifat kondisional. Sesuai dengan sifatnya, DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional pada daerah tertentu Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima dana alokasi khusus, yaitu daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu daerah penerima DAK wajib menganggarkan APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran DAK yang diterimanya, dan terakhir kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada menteri keuangan teknis dan menteri dalam negeri.

3) Dana Bagi Hasil, merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pipit Syarifin (2005 : 108) “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Bagi Hasil yang bersal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 wajib OP dalam negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan pada Pasal 11 ayat 2 UU No.33 Tahun 2004, DBH yang bersumber dari daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan panas bumi. Penerimaan negeri dari PBB dibagi sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah provinsi 64,8% untuk daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagi pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbang sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan sebesar 35% dibagikan sebagai insentif mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 Pasal

1 ayat 1 “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dalam peraturan daerah”.

Menurut Halim (2012 : 87) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi”.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yang biasanya satu tahun.

#### **4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan daerah yang meliputi anggaran realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengertian Kinerja Menurut Bastian (2001 : 23) “Bahwa gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

Kinerja merupakan suatu atas pencapaian yang sudah direncanakan. Pencapaian yang sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja tersebut yang direncanakan akan terlaksanakan dengan baik dan apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerja yang tidak sesuai dengan apa apa yang direncanakan maka kinerja yang direncanakan tidak berjalan dengan lancar. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Rudianto (2013 : 189) “Analisis kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu”.

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 “Tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”.

Menurut Kasmir (2011 : 23) Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia”. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD dan rasio aktivitas atau keserasian. Menurut Halim (2007:25) “Salah satu untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan”.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah ditetapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yg bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Menurut Kasmir (2014 : 104) “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode”.

## **5. Rasio Keuangan Daerah**

Menurut Mohammad Mahsun (2011 : 135) “analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD beberapa dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Berikut Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah :

**Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011:81)

- 1) Pola Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- 2) Pola Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu mandiri.

#### b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Berikut kriteria pengukuran efektivitas:

**Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Kriteria	Presentasi
Efektif	( $x > 100\%$ )
Efektif Berimbang	( $x = 100\%$ )
Tidak Efektif	( $< 100\%$ )

Sumber : Mahmudi (2010:32)

### c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau 100%. Semakin kecil rasio keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Berikut Kriteria Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah :

**Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efisiensi**

Kriteria	Presentase
Tidak Efisien	Diatas 100%
Efisien Berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber : Mohammad Mahsun (2011:187)

### d. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio Aktivitas (Keserasian) menggambarkan bagaimana pemerinta daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Aktivitas (Keserasian) ini yaitu :

- 1) Rasio Belanja Operasi, dan
- 2) Rasio Belanja Modal.

#### e. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudin (2010:138) “rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Artinya, bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti / tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1	Ebit Julitawati (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
2	Budianto (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan	Kinerja Keuangan Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

		(PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Sulawesi Utara	Dana Perimbangan		Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
3	Febri Ferta Yanto (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Sumbar	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
4	Khairani (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Sumbar	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
5	Yoshinta Endah Wahyudiningsih (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan

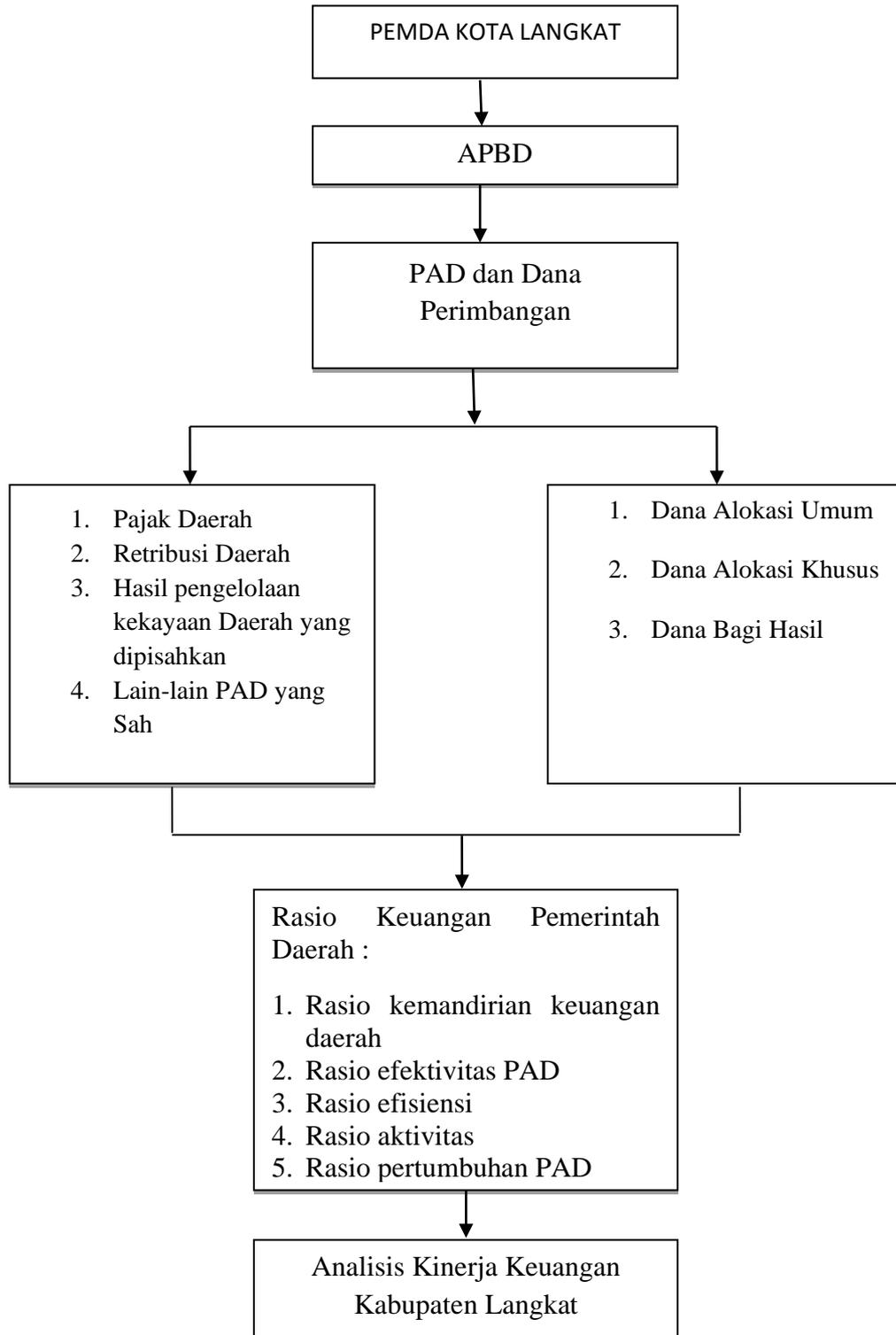
		Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah			berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
--	--	---	--	--	--

## 6. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pada masa desentralisasi saat ini, pemerintah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan infrastruktur dan sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD . semakin baik PAD maka semakin baik pula kemandirian suatu daerah dan semakin besar dana perimbangan maka semakin besar pula ketergantungan daerah pada kepada pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pembiayaan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan lain adalah dana alokasi umum yang merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yg merupakan urusan daerah dan

prioritas nasional. Jenis dana perimbangan lainnya seperti dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka berikut kerangka konseptual yang saya miliki :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan Sugiyono (2012:13) “Penelitian yang dikerjakan untuk mengenal nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau mengaitkan/menghubungkan dengan variabel yang lain”.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di jalan. Asrama No.14 Medan. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus sampai dengan selesai.

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.**

No	Kegiatan Penelitian	Jun-Agt 2018	Jul-Okt 2018	Okt-Nov 2018	Des 2018	Jan-Jun 2019	Agt 2019
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Perbaiki/ACC Proposal						
5	Riset						
6	Pengolahan Data						
7	Penyusunan Skripsi						
8	Bimbingan Skripsi						
9	Meja Hijau						

Sumber : Penulis, 2018.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009) dalam Rusiadi, dkk (2014 : 30) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang menyangkut dalam penelitian saya.

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2009 : 116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini adalah mengambil data Laporan realisasi anggaran atau RAPBD Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017.

### **D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono : 59). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

- b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas Sugiyono (2009 : 59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.

## 2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut .

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Operasional Variabel**

NO	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah	<p>Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.</p> <p>Sumber : Buku Akuntansi Publik</p>	Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Rasio
2	Dana Perimbangan	Total realisasi penerimaan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, khusus dan bagi hasil.	Besarnya dana perimbangan dapat dilihat dari laporan	Rasio

		Sumber : <a href="http://www.wikipedia.com">www.wikipedia.com</a>	APBD. Dalam penelitian ini diambil data dari periode 2011-2015	
3	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan”.	1.Rasio Kemandirian. 2.Rasio Efektivitas PAD. 3.Rasio Efisiensi. 4.Rasio Aktivitas 5.Rasio Pertumbuhan PAD.	Rasio

Sumber : Penulis, 2018.

### E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Langkat dari tahun 2013-2017 adalah data sekunder. Sedangkan data diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan APBD didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dimana mengumpulkan dan mengolah data perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan

Realisasi Penerimaan, Pengeluaran APBD Kabupaten Langkat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan nantinya akan diketahui hasil penelitiannya melalui rumus rasio Kinerja Keuangan Daerah.

## **H. Teknik Analisis Data**

### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Suryana Utama (2011:81) “Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal”. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### **2. Rasio Efektifitas PAD**

Efektivitas behungan dengan derasaajat keberhasilan operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektifitas kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Halim (2007:234) “Rasio efektifita menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

mengrealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan potensi rill daerah”. rasio efektivitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### **3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di kategorikan 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kempuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013:12) menyatakan “Bahwa bila semakin kecil rasio efisien bearti kinerja pemerintah daerah semakin baik”. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### **4. Rasio Aktivitas (Keserasian)**

Rasio aktivitas atau keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunanya secara optimal. Menurut Halim (2012:236) “Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase atau belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana

masyarakat cenderung semakin kecil”. Ada dua perhitungan aktivitas atau keserasian ini yaitu:

- a) Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanya yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60% sampai 90%. Menurut Mahmudi (2010:164) “Di dalam pemerintah daerah dengan tingkat perdapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah”. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b) Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dan total belanja daerah. berdasarkan rasio, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudin (2010:164) “Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja

daerah adalah antara 5% sampai 20%. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Operasi maupun modal atau APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah di negara yang berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal atau pembangunannya relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

## **5. Rasio Pertumbuhan PAD**

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif cenderung atau tren meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal ini akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah.

Rasio pertumbuhan PAD berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan di masa lalu. Menurut Mahmudin (2010:138) "Rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau

negatif'. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Menurut Halim (2008:241) “Untuk rasio pertumbuhan PAD yang semakin tinggi total pendapatan daerah, PAD dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif”. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat**

Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat.

Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :

- a. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
- b. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
- c. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Dibawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak :

- a. Luhak langkat huli
- b. Tanjung Pura
- c. Teluk Halu

Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran

Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :

- a. Kejuruan Selesai
- b. Kejuruan Bahorok
- c. Kejuruan Sei Bingai
- d. Distrik Kwala
- e. Distrik Salopian

Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu :

- a. Kejuruan Stabat
- b. Kejuruan Bingei
- c. Distrik Secanggang
- d. Distrik Padang Tualang
- e. Distrik Cempa
- f. Distrik Pantai Cermin

Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.

- a. Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.
- b. Distrik Pulau Kumpai

c. Distrik Sei Lapan

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuko. Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

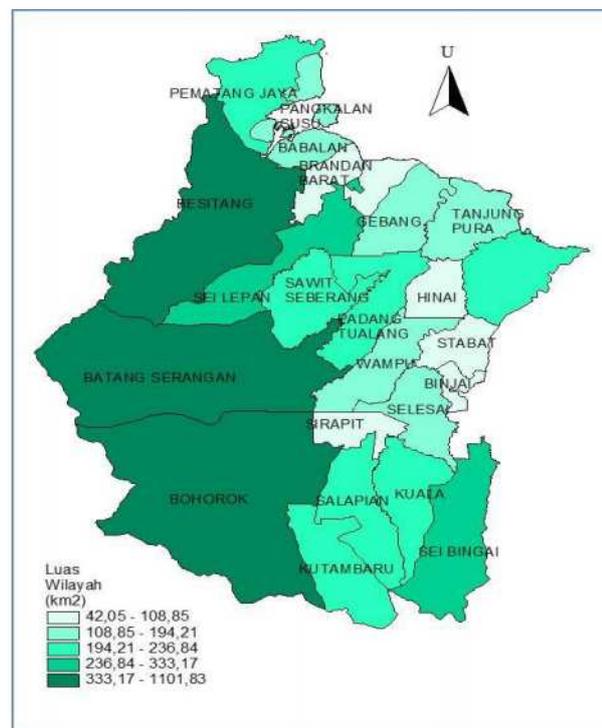
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :

- 1) Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
- 2) Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
- 3) Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh:

- (a) T. Ismail Aswhin 1967 – 1974
- (b) HM. Iscad Idris 1974 – 1979
- (c) R. Mulyadi 1979 – 1984
- (d) H. Marzuki Erman 1984 – 1989
- (e) H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994
- (f) Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998
- (g) H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999
- (h) H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009
- (i) Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang

Berikut disajikan Peta Kabupaten Langkat dengan perbandingan luas kecamatan sebagai berikut :



Sumber ; BPS Kabupaten Langkat, 2018

**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Langkat**

Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat dibagi atas 3 wilayah pembangunan, yaitu :

- 1) Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi
  - (a) Kecamatan Bahorok dengan 19 desa
  - (b) Kecamatan Salapian dengan 22 desa
  - (c) Kecamatan Kuala dengan 16 desa
  - (d) Kecamatan Selesai dengan 13 desa
  - (e) Kecamatan Binjai dengan 7 desa
  - (f) Kecamatan Sei Bingai 15 desa
  
- 2) Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliputi
  - (a) Kecamatan Stabat dengan 18 desa dan 1 kelurahan
  - (b) Kecamatan Secanggang dengan 14 Desa
  - (c) Kecamatan Hinai dengan 12 desa
  - (d) Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa
  - (e) Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa dan 1 kelurahan
  
- 3) Wilayah pembangunan III (Teluk Haru) meliputi
  - (a) Kecamatan Gebang dengan 9 desa
  - (b) Kecamatan Brandan Barat dengan 6 desa
  - (c) Kecamatan Sei Lapan dengan 5 desa dan 5 kelurahan
  - (d) Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan
  - (e) Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa 2 kelurahan

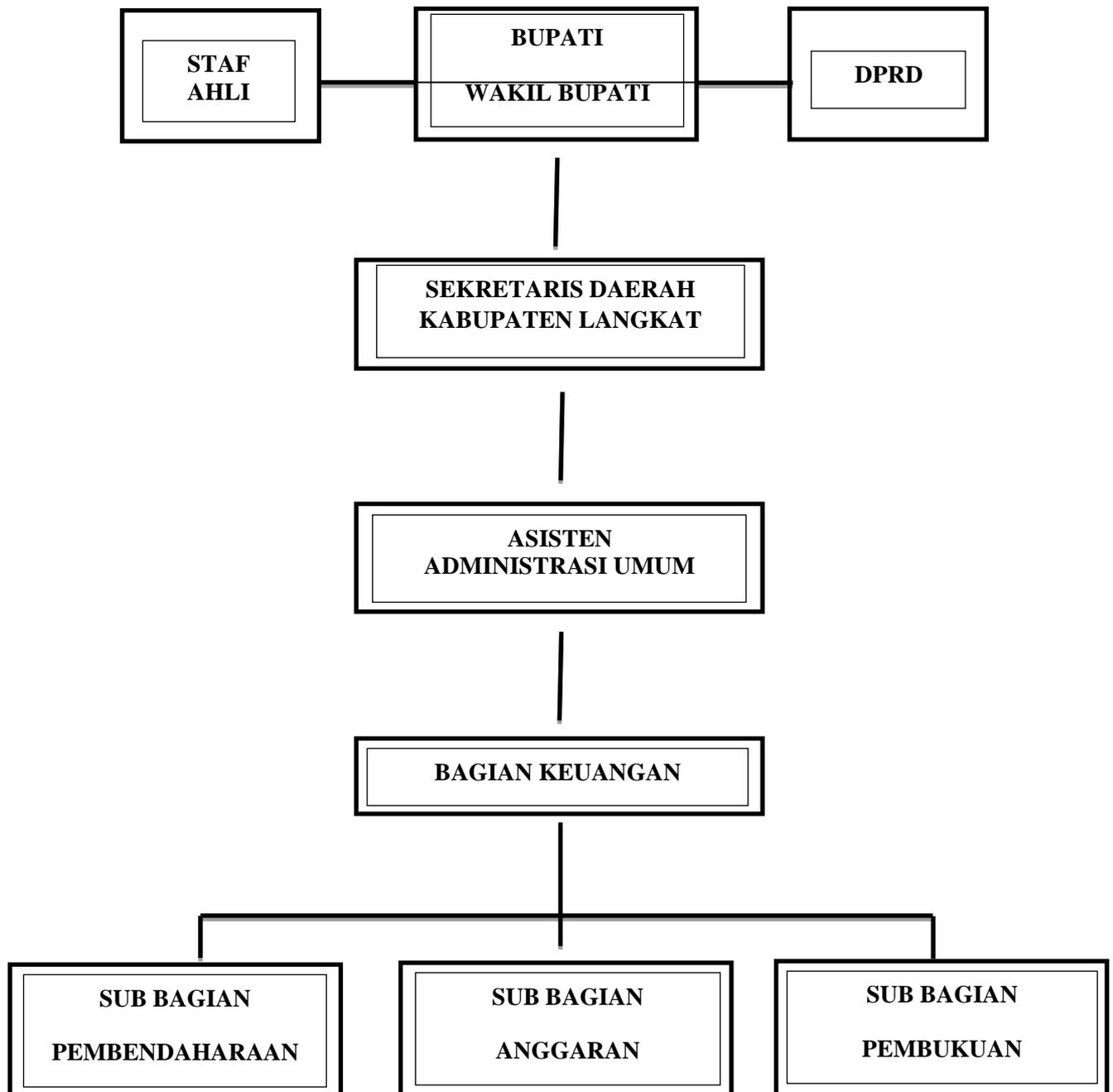
(f) Kecamatan Besitang dengan 8 desa dan 3 kelurahan

Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu Bupati. Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat dibantu atas dinas-dinas otonom, Instansi pusat baik Departemen maupun non Departemen yang kesemuanya merupakan pembantu-pembantu Bupati. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

## **2. Visi Dan Misi Kabupaten Langkat**

- a. Adapun visi dari pemerintah kabupaten langkat adalah terwujudnya masyarakat langkat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri, berlandaskan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan.
- b. Adapun misi dari pemerintahan kabupaten langkat adalah sebagai berikut :
  - 1) Meningkatkan profesionalisme birokrasi.
  - 2) Meningkatkan kualitas sdm ( pendidikan, kesehatan dan sosial ) yang berlandaskan iman dan takwa serta pelestarian budaya.
  - 3) Memantapkan pembangunan perdesaan.
  - 4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
  - 5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah.
  - 6) Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
  - 7) Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat



Sumber : Pemkab Langkat, 2018

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat**

#### **4. Bagian Kerja**

##### **a. Bupati dan Wakil Bupati**

Kepala daerah selaku pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah mempunyai wewenang :

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
- 3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- 4) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
- 5) Menetapkan pejabat yang akan bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
- 6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah.
- 7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
- 8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

##### **b. Sekretaris Daerah Kabupaten**

Sekretaris daerah kabupaten mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

### **c. Asisten Administrasi Umum**

Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan umum dan perlengkapan, keuangan, kearsipan dan perpustakaan serta pengolahan data elektronik dan sandi telekomunikasi.

### **d. Bagian Keuangan**

Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengolah dan membina administrasi keuangan serta melaksanakan pembayaran gaji PNS dilingkungan pemerintahan kabupaten langkat. Bagian keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Melakukan administrasi dan pembukuan keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat.
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD pemerintah kabupaten langkat serta pengesahan APBD pemerintah kabupaten langkat.
- 4) Melakukan pengkajian kebenaran penagihan penerbit surat perintah membayar uang (SPUM).
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten langkat.
- 6) Menyiapkan bahan keputusan bendaharawan.

7) Menyiapkan rencana, program, evaluasi, dan laporan kegiatan bagian keuangan.

8) Menyiapkan Renstra (Rencana Strategi), Renja (Rencana Kerja), dan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bagian keuangan.

**a) Sub bagian Perbendaharaan dan Gaji**

Tugasnya Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan, ketentuan dibidang keuangan dan penertiban surat perintah penagihan, penerimaan, membayar uang serta menguji memverifikasi (meneliti kebenarannya).

**b) Sub bagian Anggaran**

Tugasnya Sub bagian ini adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana APBD dan perubahan APBD, serta nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD kabupaten langkat dan petunjuk pelaksanaan APBD.

**c) Sub bagian Pembukuan**

Tugasnya Sub bagian ini adalah menyiapkan bahan penyusunan untuk melakukan pembukuan.

**5. Analisis Data**

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkat dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Langkat pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas,

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Langkat. Sebelum dilakukannya analisis, berikut disajikan data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat Periode 2012-2016.

**Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pad Yang Sah	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2013	Rp.65.521	Rp.27.682	Rp.23.953	Rp.4.637	Rp.9.247	Rp.70.674
2014	Rp.107.811	Rp.37.150	Rp.15.433	Rp.3.398	Rp.51.830	Rp.33.965
2015	Rp.122.715	Rp.42.304	Rp.18.370	Rp.5.745	Rp.56.295	Rp.93.707
2016	Rp.132.673	Rp.46.948	Rp.19.471	Rp.7.996	Rp.58.256	Rp.201.125
2017	Rp.139.717	Rp.56.895	Rp.20.768	Rp.6.953	Rp.55.100	Rp.300.503

Sumber : Pemerintah Kab. Langkat, 2018.

Selain data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diatas, berikut disajikan juga data Dana Perimbangan Kab. Langkat periode 2013-2017 sebagai variabel penelitian berikut ini :

**Tabel 4.2 Dana Perimbangan Kabupaten Langkat**  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	DBH Pajak	DBH bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2013	Rp. 1.419.706	Rp. 163.142	Rp. 6.313	Rp. 982.658	Rp. 81.165
2014	Rp. 1.540.371	Rp. 141.387	Rp. 12.097	Rp. 1.039	Rp. 67.162
2015	Rp. 1.804.256	Rp. 137.937	Rp. 4.887	Rp. 1.099	Rp. 146.253
2016	Rp. 1.881.248	Rp. 158.644	Rp. 6.806	Rp. 1.200	Rp. 366.784
2017	Rp. 1.871.062	Rp. 180.799	Rp. 2.558	Rp. 1.179	Rp. 411.765

Sumber : Pemerintah Kab.Langkat, 2018.

Kemudian disajikan pula data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab.Langkat periode 2013-2017 sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
(dalam rupiah)

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2013	Rp. 1.603.656.988.480	Rp. 1.544.087.498.842
2014	Rp. 1.623.707.886.136	Rp. 1.630.725.542.306
2015	Rp. 2.017.699.111.462	Rp. 2.020.688.705.016
2016	Rp. 2.336.327.100.862	Rp. 2.215.047.135.450
2017	Rp. 2.348.070.654.167	Rp. 2.311.283.153.445

Sumber : Pemerintah Daerah Kab. Langkat, 2018.

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, berarti semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 65.521.499.189}{\text{Rp } 1.555.901.880.204} \times 100\% \\ &= 4,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 107.811.975.574}{\text{Rp } 1.682.148.382.104} \times 100\% \\ &= 6,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 122.715.359.909}{\text{Rp } 2.020.688.705.016} \times 100\% \\ &= 6,07\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 16.132.673.213.412}{\text{Rp } 2.215.047.135.449} \times 100\% \\ &= 5,98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 139.717.647.855}{\text{Rp } 2.311.283.153.445} \times 100\% \\ &= 6,04\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat**

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2013	Rp. 65.521.499.189	Rp. 1.555.901.880.204	4,21%	Instruktif
2014	Rp. 107.811.975.574	Rp. 1.682.148.382.104	6,4%	Instruktif
2015	Rp. 122.715.359.909	Rp. 2.020.688.705.016	6,07%	Instruktif
2016	Rp. 132.673.213.412	Rp. 2.215.047.135.449	5,98%	Instruktif
2017	Rp. 139.717.647.855	Rp. 2.311.283.153.445	6,04%	Instruktif

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, maka untuk rasio kemandirian keuangan kabupaten langkat yang diukur dalam lima tahun berturut-turut, dimana untuk tahun 2013 adalah sebesar 4,21% yang termasuk dalam kategori rendah

sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif, karena berada diantara 0%-25%. Untuk tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 6,4% yang juga masih berada dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif, untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 6,07% dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif, untuk tahun 2016 dan 2017 rasio kemandirian mengalami peningkatan kembali menjadi 5,98% dan 6,04%, dimana perhitungan ini juga masih berada dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif, karena berada diantara 0%-25%, dalam artian menunjukkan bahwa pola hubungan Instruktif adalah hubungan antara peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten langkat masih sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio kemandirian yang rendah sekali menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi atau daerah belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

#### **b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektivitas apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan potensi rill daerah.

Rasio efektivitas diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 1.544.087.498.842}{\text{Rp } 1.603.656.988.480} \times 100 \\ &= 96,28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 1.630.725.542.306}{\text{Rp } 1.623.707.886.136} \times 100 \\ &= 100,43\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 2.020.688.705.016}{\text{Rp } 2.017.699.111.462} \times 100 \\ &= 100,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 2.215.047.135.450}{\text{Rp } 2.336.327.100.862} \times 100 \\ &= 94,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 2.311.283.153.445}{\text{Rp } 2.348.070.654.167} \times 100 \\ &= 98,4\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Efektivitas PAD	Kriteria
2013	Rp.1.544.087.498.842	Rp.1.603.656.988.480	96,28%	Tidak Efektif
2014	Rp.1.630.725.542.306	Rp.1.623.707.886.136	100,43%	Efektif
2015	Rp.2.020.688.705.016	Rp.2.017.699.111.462	100,14%	Efektif
2016	Rp.2.215.047.135.450	Rp.2.336.327.100.862	94,80%	Tidak Efektif
2017	Rp.2.311.283.153.445	Rp.2.348.070.654.167	98,4%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah 2018

Dapat dilihat dari tabel diatas, rasio efektivitas atas pendapatan daerah kabupaten langkat pada tahun 2013 adalah sebesar 96,28%. Hal ini, menunjukkan bahwa kategori efektivitas pendapatan tidak efektif karena berada dibawah 100%. Pada tahun berikutnya yakni di 2014 mengalami peningkatan menjadi 100,43%. Hal ini menunjukkan bahwa, efektivitas pendapatan berada dalam kategori efektif. Untuk tahun 2015 juga berada dalam kategori efektif meskipun mengalami penurunan menjadi 100,14%. Sedangkan untuk tahun 2016 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 94,80% lalu disusul ditahun 2017 menjadi 98,4% yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Melalui analisis rasio efektivitas pendapatan dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah yang harus dicapai pada periode tertentu. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, terget pendapatan daerah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan hanya pada tahun 2014 dan 2015.

### c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 1.538.237.299.028}{\text{Rp } 1.555.901.880.204} \times 100\% \\ &= 98,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 1.605.301.211.464}{\text{Rp } 1.682.148.382.104} \times 100\% \\ &= 95,43\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 1.934.943.728.406}{\text{Rp } 2.020.688.705.016} \times 100\% \\ &= 95,75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 2.010.165.930.138}{\text{Rp } 2.215.047.135.449} \times 100\% \\ &= 90,75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 2.320.218.854.855}{\text{Rp } 2.311.283.153.445} \times 100\% \\ &= 100,38\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Langkat**

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria Efisiensi
2013	Rp. 1.538.237.299.028	Rp. 1.555.901.880.204	98,86%	Efisien
2014	Rp. 1.605.301.211.464	Rp. 1.682.148.382.104	95,43%	Efisien
2015	Rp. 1.934.943.728.406	Rp. 2.020.688.705.016	95,75%	Efisien
2016	Rp. 2.010.165.930.138	Rp. 2.215.047.135.449	90,75%	Efisien
2017	Rp. 2.320.218.854.855	Rp. 2.311.283.153.445	100,38%	Tidak Efisien

Sumber : Data Diolah 2018

Dapat dilihat dari tabel diatas, untuk belanja pemerintah kabupaten langkat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2013 berada diangka 98,86 % yang termasuk dalam kategori efisien. Untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan persentase di angka 95,43% namun masih berada dalam kriteria efisien. dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan di angka 95,75% dan di tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 90,75% . Namun di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 100,38% dan berubah kriteria menjadi tidak efektif. Meskipun mengalami penurunan dan peningkatan pada empat tahun tersebut masih dikategorikan efisien dari tahun 2013-2016 karena keseluruhannya kurang dari 100 %. Berbeda ditahun 2017 yang mengalami peningkatan hingga berada diangka 100,38% yang mengubahnya menjadi tidak efisien.

Melalui analisis efisiensi penerimaan daerah dapat diketahui seberapa besar efisiensi belanja daerah yang dikeluarkan dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten langkat. Dengan hasil kriteria efisiensi pendapatan pemerintah kabupaten langkat menunjukkan bahwa, kinerja dari pendapatan daerah kabupaten langkat dinilai cukup baik.

**d. Rasio Aktivitas/ Keserasian**

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 308.603.854.953}{\text{Rp } 1.538.237.299.028} \times 100\% \\ &= 20,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 329.542.794.731}{\text{Rp } 1.665.301.211.464} \times 100\% \\ &= 20,52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 497.257.525.402}{\text{Rp } 1.934.943.728.408} \times 100\% \\ &= 25,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 626.295.461.426}{\text{Rp } 2.010.165.930.138} \times 100\% \\ &= 31,15\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 527.164.701.722}{\text{Rp } 2.320.218.854.855} \times 100\% \\ &= 22,72\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.7 Rasio Aktivitas/Keserasian Kabupaten Langkat**

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2013	Rp. 308.603.854.953	Rp. 1.538.237.299.028	20.06%
2014	Rp. 329.542.794.731	Rp. 1.605.301.211.464	20.52%
2015	Rp. 497.257.525.402	Rp. 1.934.943.728.406	25.69%
2016	Rp. 626.295.461.426	Rp. 2.010.165.930.138	31.15%
2017	Rp. 527.164.701.722	Rp. 2.320.218.854.855	22.72%

Sumber : Data Diolah ,2018.

Dapat dilihat dari tabel 4.7 di atas, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten langkat untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini sejalan dengan belanja daerah pemerintah kabupaten langkat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Untuk tahun 2013 rasio belanja modal sebesar 20.06% , lalu pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan menjadi 20.52% , untuk tahun 2015 rasio belanja modal berada pada tingkat 25.69%, sedangkan pada tahun 2016 rasio belanja modal terus mengalami peningkatan hingga 31.15% . seluruh peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa rasio belanja modal dikatakan cukup baik karena proporsinya berada di atas 5%-20%. Namun ditahun 2017 mengalami penurunan di angka 22,72%, tapi tetap berada dalam posisi baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten langkat dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Melalui analisis rasio belanja modal pemerintah kota langkat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kota langkat guna untuk melaksanakan kegiatan dalam kebutuhan pembangunan daerah.

#### **e. Rasio Pertumbuhan PAD**

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negative. Pertumbuhan pendapatan secara positive cenderung meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan yang negative maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 65.521.499.189 - \text{Rp } 129.244.580.780}{\text{Rp } 129.244.580.780} \times 100\% \\ &= (49,30\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 107.811.975.574 - \text{Rp } 65.521.499.189}{\text{Rp } 65.521.499.189} \times 100\% \\ &= 64,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 122.715.359.909 - \text{Rp } 107.811.975.574}{\text{Rp } 107.811.975.574} \times 100\% \\ &= 13,82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 132.673.213.412 - \text{Rp } 122.715.359.909}{\text{Rp } 122.715.359.909} \times 100\% \\ &= 8,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 139.717.647.855 - \text{Rp } 132.673.213.412}{\text{Rp } 132.673.213.412} \times 100\% \\ &= 5,3\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**

Tahun	Pendapatan Awal	Pendapatan Akhir	Pertumbuhan PAD
2012	Rp. 129.244.580.780	Rp. 0	0%
2013	Rp. 65.521.499.189	Rp. 129.244.580.780	(49,30%)
2014	Rp. 107.811.975.574	Rp. 65.521.499.189	64,54%
2015	Rp. 122.715.359.909	Rp. 107.811.975.574	13,82%
2016	Rp. 132.673.213.412	Rp. 122.715.359.909	8,11%
2017	Rp. 139.717.647.855	Rp. 132.673.213.412	5,3%

Sumber : Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel analisis diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah kab.langkat hanya mengalami peningkatan ditahun 2014

diangka 64,54%, sisanya dari tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dimulai dari tahun 2015 sebesar 13,82% lalu turun di tahun 2016 menjadi 8,11% dan terakhir mengalami penurunan di tahun 2017 diangka 5,3%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari periode satu ke periode berikutnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017**

Tingkat kemandirian pemerintah kabupaten langkat tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 masih masuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan daripada kemampuan kemandirian pemerintah daerah kabupaten langkat. Penilaian ini dapat dilihat dari tabel rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu tergolong dalam rasio 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah sekali menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan pemerintahannya sangat bergantung bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga kemandirian keuangan daerah kabupaten langkat secara keseluruhan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai secara mandiri pos-pos kebutuhan operasional daerahnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak maupun retribusi daerah belum dapat di andalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan pajak dan retribusi merupakan

sumber penerimaan yang sangat dominan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah kabupaten langkat harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang telah ada. Karena inisiatif dan kemauan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kemudian tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten langkat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tergolong efektif pada periode 2014 dan 2015, sebaliknya pada tahun 2013, dan tahun 2016 – 2017 termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada di bawah 100%. Penurunan rasio efektifitas ini terjadi karena realisasi pendapatan asli daerah masih berada dibawah nilai target pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan. Dengan menurunnya rasio ini maka menunjukkan pemerintah kabupaten langkat dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sedangkan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah kabupaten langkat pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan persentase nilai rasio efisiensi. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan di nilai cukup baik karena pemerintah kabupaten langkat mampu meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan. Meskipun jumlah belanja daerah meningkatkan namun di iringi dengan peningkatan total pendapatan daerah sehingga mampu mencukupi belanja daerahnya. Hal ini tentu sangat diharapkan kepada pemerintah daerah agar mampu mempertahankan efisiensi kinerja keuangan daerahnya. Namun di tahun 2017

rasio efektivitas meningkat menjadi 100,38% sehingga berubah menjadi kategori tidak efisien, karena berada di atas batas toleransi 100%.

Untuk tingkat rasio keserasian dalam hal ini peneliti mengukur dengan rasio belanja modal pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan hanya ditahun 2017 mengalami penurunan tetapi masih berada di atas batas toleransi 5%-20%. Untuk pengeluaran kegiatan operasional pemerintah kabupaten langkat cukup baik karena pemerintah kabupaten langkat dalam hal ini mampu meminilkan pengeluarannya sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan daerah cukup mampu dalam menjalankan kegiatan serta kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Tingkat rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah yang diukur untuk tahun 2012 dan 2017 memiliki nilai rasio pertumbuhan yang rendah dan cenderung menurun sehingga pemerintah kabupaten langkat mengalami defisit atau penurunan nilai pertumbuhan pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.8 mengenai rasio pertumbuhan PAD, dimana pada tahun 2013 pertumbuhan pendapatan asli daerah mencapai (49,30%). Menyadari kondisi tersebut pemerintah kabupaten langkat terus memperbaiki kinerja keuangannya pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2014 dimana pemerintah kabupaten langkat berhasil menaikkan pertumbuhan pendapatan asli daerah nya menjadi 64,54%. Namun hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan menyusul tahun-tahun berikutnya pertumbuhan pendapatan asli daerah terus menurun hingga mencapai 5,3% pada tahun 2017.

## **2. Pengelolaan Dana Perimbangan Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017**

Tingkat kemandirian pemerintah kabupaten langkat tahun 2013 sampaidengan tahun 2017 masih tidak memberikan dampak positif bagi Kabupaten Langkat. Dapat dilihat, dana yang diterima dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih rendah. Setiap tahun mulai dari 2013-2017 Dana Alokasi Umum tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan, lalu Dana Alokasi Khusus mengalami fluktuasi selama 5 tahun tersebut yaitu terjadi di tahun 2013 ke 2014. Dan terakhir dari Dana Bagi Hasil Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017 melalui data yang telah saya cantumkan diatas menunjukkan fluktuasi ditahun 2014-2015 dan signifikan penurunan tersebut terjadi di tahun 2016-2017.

Dengan demikian dari sumber Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah Kabupaten Langkat untu Dana Perimbangan menunjukkan bahwa masih sedikit peran dana perimbangan untuk berkontribusi bagi pemerintahnya. Dimana hal ini memberikan dampak kuran baik bagi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang awalnya diharapkan mampu mengurangi kesenjangan fiskal antar pemeintah dengan daerah dan daerah lain, seta mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonominya.

## **3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017 Dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio kemandirian yang rendah sekali menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi atau daerah

belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Lalu melalui analisis rasio efektivitas pendapatan dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah yang harus dicapai pada periode tertentu. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, target pendapatan daerah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan hanya pada tahun 2014 dan 2015.

Selanjutnya, melalui analisis efisiensi penerimaan daerah dapat diketahui seberapa besar efisiensi belanja daerah yang dikeluarkan dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten langkat. Dengan hasil kriteria efisiensi pendapatan pemerintah kabupaten langkat menunjukkan bahwa, kinerja dari pendapatan daerah kabupaten langkat dinilai cukup baik. Dan dengan analisis rasio belanja modal pemerintah kota langkat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kota langkat guna untuk melaksanakan kegiatan dalam kebutuhan pembangunan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten langkat dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Dan yang terakhir, dari penjelasan diatas dalam disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu memperthankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari periode satu periode ke periode berikutnya.

Sehingga dapat disimpulkan dari seluruh proses analisis rasio keuangan daerah yang telah peneliti terangkan diatas, pemerintah kabupaten langkat dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah masih kurang baik sehingga Kinerja keuangan pemerintah kabupaten langkat yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten langkat, selain itu juga besarnya dana sumbangan yang diberikan pemerintah pusat, dan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintahan kabupaten langkat. Tentu saja keadaan tersebut berdampak tidak baik bagi kinerja keuangan pemerintah kabupaten langkat, dimana pemerintah kabupaten langkat dalam hal ini belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan operasional daerahnya.

Kemudian dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya persamaan hasil penelitian dari Ebit Julitawati (2012) dimana keseluruhan komponen pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, dan lain pendapatan daerah yang sah) sangat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten langkat.

Lalu penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita (2014:2) bahwa “Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal”. Dan menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dana perimbangan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasa 11:19 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah :

1. Keseluruhan komponen pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dan lain pendapatan daerah yang sah) masih kurang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang sangat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Dana Perimbangan yang diterima melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten Langkat.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang diukur menggunakan Rasio kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio efisiensi, Rasio aktivitas/keserasian dan Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pada penelitian ini selama tahun 2013-2017 rata-rata mengalami penurunan. Artinya, pemerintah kabupaten Langkat masih belum mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan mampu meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya secara maksimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dianggarkan. Sehingga tingkat ketergantungan sumber dana eksternal atau pemerintah pusat dapat diminimalisir.
2. Pemerintah kabupaten langkat diharapkan mampu mempertahankan kemampuannya dalam memaksimalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih menambah variable penelitiannya agar hasil penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat dibandingkan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Yani, AK, M.M, S.H. (2002). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Mardiasmo, Dr, Prof. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Cetakan ke 1. Jakarta : Penerbit Andi

Jurnal :

Adisasmita.,(2014:2, *Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Para Ahli*

Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1

Aspan, H., I. M. Sipayung, A. P. Muharrami, and H. M. Ritonga. (2017). "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)". *International Journal of Global Sustainability*, ISSN 1937-7924, Vol. 1, No. 1, pp. 55-66.

Budianto.,(2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4.No.4

Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.

Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & Siahaan, A. P. U. (2016). Productivity assessment (performance, motivation, and job training) using profile matching. *SSRG Int. J. Econ. and Management Stud*, 3(6).

Halim.,(2001:23). *Pengertian Analisis Kinerja Keuangan Menurut Para Ahli*

Halim.,(2004:132). *Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Para Ahli*

Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant "Melayu" in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.

- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia.
- Julitawati Ebit,. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi . Vol.1.No.1
- Febri Ferta Yanto,.(2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumbar*. Jurnal Akuntansi. Vol.7.No.1
- Kadjatmiko,.(2002:79). *Pengertian Dana Perimbangan Menurut Para Ahli Jurnal Akuntansi*
- Khairani,.(2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012*. Jurnal Akuntansi. Vol.2.No.2
- Lestario, F. (2018). Dampak Pertumbuhan Bisnis Franchise Waralaba Minimarket Terhadap Perkembangan Kedai Tradisional Di Kota Binjai. *Jumant*, 7(1), 29-36.
- Mahmudin ,.(2010:138). *Pengertian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Menurut Para Ahli dalam Rasio Keuangan Daerah*
- Mahsun,.(2011:135). *Pengertian Rasio Keuangan Daerah Menurut Para Ahli*
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mesra, B. (2018). Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hamparan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(10), 461-469.
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.
- Pane, D. N. (2018). Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian Teh Botol Sosro (Studi Kasus Konsumen Alfamart Cabang Ayahanda). *Jumant*, 9(1), 13-25.
- Pramono, C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *JUMANT*, 9(1), 41-52.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Tessa,.(2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kab.Langkat. Jurnal Akuntansi*. Vol.1.No.1
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 19 Tentang Dana Perimbangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 19
- Yoshinta Endah Wahyuningsih,.(2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi*. Vol.9.No.1
- Wakhyuni, E. (2018). Kemampuan Masyarakat Dan Budaya Asing Dalam Mempertahankan Budaya Lokal Di Kecamatan Datuk Bandar. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 25-31.

